
Serangan Rusia ke Ukraina Tahun 2022: Perspektif Dilema Keamanan

Nurfadila¹, Yuniarti²

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Mulawarman, Indonesia
(yuniarti@fisip.unmul.ac.id)

ABSTRACT

After the collapse of the Soviet Union, relations between Russia and Ukraine have fluctuated, encompassing a period of cooperation that began in 1997 and a period of tension that began in 2004. In 2022, tensions between the two countries reached their peak due to Russia's attack on Ukraine. The research aimed to explain Russia's attack to Ukraine in 2022 and the reasons behind it. This research is a qualitative and case study research using secondary data extracted by reviewing the literature. The research concept employed in this study was the Security Dilemma concept. The results show that the reason for Russia's attack on Ukraine in 2022 is Russia's security dilemma due to Ukraine's desire to join NATO. If Ukraine joins NATO, Russia feels that its national security will be threatened due to the possibility of building NATO military bases in Ukraine and the loss of Russian influence over Ukraine.

Keywords: Russia's attack, Ukraine, security dilemma

ABSTRAK

Setelah runtuhnya Uni Soviet, hubungan antara Rusia dan Ukraina berfluktuasi, meliputi periode kerja sama yang dimulai pada tahun 1997 dan periode ketegangan yang dimulai pada tahun 2004. Pada tahun 2022, ketegangan antara kedua negara mencapai puncaknya karena serangan Rusia terhadap Ukraina. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serangan Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dan alasan di balik serangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan studi kasus dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan tinjauan literatur. Konsep penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Dilema Keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Rusia menyerang Ukraina pada tahun 2022 adalah dilema keamanan Rusia karena keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Jika Ukraina bergabung dengan NATO, Rusia merasa bahwa keamanan nasionalnya akan terancam karena adanya kemungkinan pembangunan pangkalan militer NATO di Ukraina dan hilangnya pengaruh Rusia atas Ukraina.

Kata Kunci: serangan Rusia, Ukraina, dilema keamanan

PENDAHULUAN

Ukraina dan Rusia memiliki hubungan sejarah yang erat. Kyiv, yang menjadi ibu kota Ukraina, dianggap

sebagai pusat awal peradaban Rus yang menjadi cikal bakal perkembangan kota-kota Rusia dan akhirnya membentuk suatu negara bernama Rus Kiev pada abad ke-18. Namun pada tahun 1981, konflik

internal dan invasi pasukan Soviet menyatukan Ukraina ke dalam Uni Soviet yang kemudian runtuh pada tahun 1991. Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, hubungan antara Rusia dan Ukraina mengalami perkembangan yang positif. Pada tanggal 31 Mei 1997, kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama yang dicatat dalam Traktat Persahabatan yang mulai berlaku pada tahun 1999 dengan masa berlaku selama 10 tahun. Selama beberapa tahun, hubungan kerjasama antara Rusia dan Ukraina berjalan lancar. Namun pada tahun 2004, hubungan baik tersebut mengalami gangguan akibat terjadinya aksi protes besar-besaran di Ukraina yang dikenal sebagai *Revolusi Oranye* yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Leonid Kuchma (Conant, 2023; OBE & Wallace, 2022).

Pada tahun 2005, melalui pemilu di Ukraina, Presiden Viktor Yuschenko terpilih sebagai pengganti Presiden Leonid Kuchma. Selama periode kepemimpinan Presiden Viktor Yuschenko (2005-2010), terjadi perubahan dalam hubungan bilateral antara Rusia dan Ukraina. Hubungan tersebut mulai merenggang karena Presiden Viktor Yuschenko mengadopsi sikap politik luar negeri cenderung ke arah Barat yang berbanding terbalik dengan pemerintahan Presiden Leonid Kuchma. Salah satu langkah yang diambil adalah Ukraina mengajukan permohonan untuk menjadi negara anggota Uni Eropa dan juga turut terlibat dalam perundingan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa (Ekman, 2024).

Setelah masa jabatan Presiden Viktor Yuschenko berakhir, Viktor Yanukovich terpilih sebagai presiden Ukraina berikutnya setelah memenangkan pemilu tahun 2010. Selama masa kepemimpinannya, Presiden Viktor Yanukovich mengadopsi sikap politik luar negeri yang kembali mendekatkan

hubungan antara Ukraina dan Rusia juga menunda penandatanganan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa. Kepemimpinan Presiden Viktor Yanukovich yang pro Rusia ini menyebabkan ketidakpuasan rakyat Ukraina yang menginginkan Ukraina lebih pro ke Barat. Kondisi ini juga diperparah dengan kasus korupsi dalam pemerintahan. Akibatnya terjadi aksi demonstrasi yang dikenal sebagai Euromaidan pada November 2013-Februari 2014 yang menelan korban sebanyak 100 orang (Ekman, 2024).

Pasca peristiwa Euromaidan, hubungan antara Rusia dan Ukraina mengalami eskalasi yang semakin buruk akibat tindakan aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, yang menyebabkan terjadi krisis di Ukraina. Pada saat itu, muncul pemberontakan di wilayah Donbass yang terletak di bagian Timur Ukraina. Pemberontakan tersebut bertujuan untuk memisahkan wilayah Donbass dari pemerintahan Ukraina yang berkeinginan untuk bergabung dengan Rusia. Sejak saat itu, Ukraina semakin giat mendekatkan diri ke Barat dan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota NATO (Armandhanu, 2015).

Hingga pada 26 Januari 2022, Rusia mengirim sebanyak 100.000 ribu tentara angkatan darat dan 21.000 ribu angkatan udara maupun angkatan laut lengkap dengan alat tempur menuju ke perbatasan Ukraina. Adapun kehadiran pasukan militer Rusia yang dekat dengan wilayah perbatasan Ukraina telah menyebabkan ketegangan di Ukraina dan membuat mereka mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya serangan dari Rusia. Akhirnya pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melakukan penyerangan ke Ukraina melalui serangan udara, laut, dan darat ke beberapa kota besar seperti Mariupol, Kyiv, serta Kharkiv (Oktarianisa, 2022).

Serangan Rusia ini telah menyulut reaksi dari dunia internasional termasuk PBB. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, secara tegas mengutuk serangan ini dan mendesak seluruh pasukan militer Rusia untuk segera mundur ke negara asalnya. Guterres juga menyampaikan permohonan khusus kepada Presiden Vladimir Putin untuk mendorong terciptanya perdamaian.

Tidak berhenti di situ, PBB juga merumuskan resolusi melalui Sidang Majelis Umum PBB dengan nomor A/RES/ES-11/1 yang mencakup agenda pembahasan tentang serangan Rusia ke Ukraina. Resolusi tersebut bertujuan mendesak pasukan militer Rusia untuk segera meninggalkan wilayah Ukraina (cnnindonesia.com, 2022). Walaupun sebagian besar dunia internasional telah mendesak Rusia untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung, namun perang tetap berlanjut. Hingga genap satu tahun, Rusia justru menargetkan wilayah Zaporizhzhia dan Kherson sebagai bagian dari wilayah jajahan baru (bbc.com, 2022). Melihat adanya respon dari dunia internasional terhadap serangan Rusia ke Ukraina. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan serangan Rusia ke Ukraina tahun 2022 dan alasan dibalik serangan tersebut dalam perspektif dilema keamanan.

LITERATURE REVIEW

Dilema Keamanan

Teori dilema keamanan dan model spiral yang lebih luas menyusun teori yang kuat tentang perang dan perdamaian melalui interaksi. Teori ini menggambarkan dinamika umum yang mengarah pada pecahnya perang dan pemeliharaan perdamaian (yaitu, dengan membalikkan atau meredakan dilema keamanan) (Tang, 2009).

Menurut Herz, dilema keamanan merupakan suatu konsep struktural dimana tindakan yang diambil oleh suatu negara semata-mata untuk menjaga keamanan dan integritasnya sendiri, terkadang dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau ketegangan pada negara-negara lain, terutama negara tetangga karena merasa terancam. Setiap negara yang melakukan tindakan tersebut berpikir bahwa langkah tersebut bertujuan semata-mata untuk memperkuat pertahanan dan keamanan mereka sendiri, namun jika tindakan serupa dilakukan oleh negara lain, hal itu dapat dianggap sebagai ancaman. Hal ini terjadi karena tatanan internasional memiliki sifat anarki, sehingga setiap negara merasa perlu memiliki kekuatan dan keamanan sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman serangan negara lain. Dalam konteks ini, mayoritas negara memiliki keinginan untuk meningkatkan kekuatan militer mereka tanpa dianggap sama dengan negara lain. Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara secara alami akan mengalokasikan anggaran militer maupun bergabung dengan aliansi sebagai bagian dari upaya mereka dalam memperkuat kemampuan pertahanan. Namun, masalah timbul ketika beberapa negara tidak memahami niat defensif dari negara yang melakukan tindakan dilema keamanan, dan sebagai gantinya, menafsirkan langkah tersebut sebagai ancaman yang mengarah pada kemungkinan serangan (Herz, 1950).

Konsep dilema keamanan juga berhubungan erat dengan realisme dalam studi Hubungan Internasional. Dalam pandangan realisme, manusia dianggap sebagai makhluk yang cenderung merasa khawatir terhadap keamanan diri mereka sendiri ketika berada dalam konteks persaingan dengan orang lain. Dalam konteks ini, setiap negara bertindak untuk mencari keamanan dan kepentingan

nasionalnya sendiri, tanpa adanya otoritas pusat yang mengatur dan mengontrol tindakan mereka. Karena itu, negara-negara cenderung saling curiga dan berusaha meningkatkan kekuatan militer mereka sebagai upaya untuk menjaga keamanan diri dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan ketegangan. Namun, setiap negara memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda. Sebenarnya, hierarki internasional telah mapan dengan adanya kekuasaan diantara negara-negara dunia. Negara-negara yang termasuk dalam kelas atas dalam tatanan politik dunia adalah negara-negara dengan kekuatan besar (*great power*) yang mendominasi. Realisme memandang hubungan internasional sebagai arena persaingan diantara negara-negara kelas atas untuk mencapai dominasi dalam sistem internasional dan mencari keamanan yang memadai. Kaum realisme menyatakan bahwa kekuatan politik terkuat adalah kebebasan, yang dalam kata lain berarti kemerdekaan. Tanggung jawab terbesar seorang pemimpin adalah berupaya meningkatkan keunggulan kekuatan dan menjaga kepentingan negaranya serta menjamin keamanan bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Semua itu hanya dapat tercapai jika negara tersebut memiliki kekuatan yang kuat. Jika suatu negara tidak memiliki keunggulan apapun, maka hal tersebut akan memicu hasrat negara lain untuk mencoba menghancurkannya sebagai tolak ukur kekuatan negara (Jackson & Sorensen, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan studi kasus yang menjelaskan serangan Rusia ke Ukraina tahun 2022 dan alasan dibalik penyerangan tersebut. Data yang

digunakan merupakan data sekunder yang bersifat kualitatif dan diperoleh melalui studi literatur atau telaah pustaka (Neuman, 2016).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) dengan tahapan sebagai berikut: (1) pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur; (2) pengurangan data dengan menyesuaikan data sesuai dengan klasifikasi kebutuhan; (3) pengumpulan dan penyajian data kembali; (4) akhirnya, data diverifikasi dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Serangan Rusia ke Ukraina Pada Februari 2022

Pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 05.00 pagi waktu Eropa Timur, Rusia melancarkan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Serangan udara dan rudal dari Rusia menyerbu seluruh wilayah Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv. Menyikapi situasi ini, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, segera mengeluarkan perintah darurat militer yang menyatakan bahwa agar semua pemuda Ukraina berusia 18 hingga 60 tahun tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah Ukraina. Tindakan ini bertujuan untuk membantu pasukan militer Ukraina melindungi wanita dan anak-anak dengan memindahkan mereka ke tempat pengungsian yang lebih aman.

Serangan yang dilakukan Rusia mengakibatkan sekitar sepertiga penduduk Ukraina mengungsi ke beberapa negara, menurut laporan UNHCR, Slovakia menampung sekitar 342.000 pengungsi, Hungaria menampung sekitar 471.000 pengungsi, Moldova menampung sekitar 427.000 pengungsi, dan Polandia menampung jumlah pengungsi terbesar,

mencapai angka 2,8 juta pengungsi (CNBC Indonesia, 2022). Situasi ini memicu krisis pengungsi Eropa yang paling cepat sejak Perang Dunia II. Sebelum dilakukannya serangan, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidatonya melalui saluran televisi, yang menyampaikan bahwa Ukraina telah diperdaya oleh kelompok neo-nazi yang menindas orang Rusia di Ukraina.

Pada Maret 2022, serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina terhenti akibat banyaknya pasukan militer Rusia yang gugur di medan perang serta perlawanan yang cukup kuat dari Ukraina karena mendapat bantuan militer dari NATO dan Amerika Serikat. Rusia kembali melanjutkan serangannya pada tanggal 19 April 2022 dengan menyerang Luhansk, Donetsk, dan Kharkiv dari jarak garis depan sepanjang 300 mil yang disertai dengan menjatuhkan rudal dari udara pada wilayah Lviv bagian barat dan Kyiv bagian utara secara beruntun.

PBB menyatakan jumlah korban warga sipil Ukraina yang tewas mencapai angka 5.401 jiwa, sedangkan sebanyak 7.466 korban mengalami luka-luka, laporan ini mencakup masa periode perang dari 24 Februari 2022 hingga 07 Agustus 2022. Selanjutnya Pemerintah Ukraina mengumumkan sebanyak 10.000 pasukan militer Ukraina telah gugur dalam peperangan dengan 30.000 lainnya mengalami luka-luka, laporan ini mencakup masa periode perang dari 24 Februari 2022 hingga 03 Juni 2022. BBC Rusia juga turut melaporkan jumlah pasukan militer Rusia yang gugur dalam peperangan mencapai angka 10.189 korban jiwa, laporan ini mencakup masa periode perang dari 24 Februari 2022 hingga 07 Agustus 2022 (Kirby, 2022).

Kementerian Lingkungan Hidup Ukraina melaporkan pada Oktober 2022 dampak serangan Rusia terhadap

lingkungan hidup di Ukraina telah menyebabkan kerugian senilai Rp. 542,3 triliun. Data ini diperoleh dari catatan sebanyak 2.000 kasus kerusakan lingkungan hidup di Ukraina. Dari 2.000 kasus tersebut, kerugian akibat polusi udara dan kerusakan tanah akibat perang antara Rusia dan Ukraina masing-masing mencapai 25 miliar euro dan 11,4 miliar euro (UNEP, 2022).

Akibat perang yang terus berlanjut, pada bidang ekonomi, Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan pertumbuhan produk domestik bruto riil milik Ukraina menurun sebanyak 35 persen pada tahun 2022. Diketahui angka penurunan tersebut adalah angka penurunan tertinggi selama tiga dekade di Kyiv. IMF juga melaporkan Rusia mengalami guncangan ekonomi sebanyak 2,1 persen pada tahun 2022 yang disebabkan oleh sanksi Barat pada Moskow. Selain pada bidang ekonomi, Ukraina juga mengalami krisis pada sektor biji-bijian data dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyatakan Ukraina mengalami penurunan panen biji-bijian sebanyak 35 juta ton pada tahun 2022 padahal Ukraina merupakan pengekspor biji-bijian terbesar di dunia (UNEP, 2022).

Selain itu, data terbaru pada November 2023 jumlah korban warga sipil Ukraina yang tewas akibat serangan Rusia menurut PBB sedikitnya mencapai 10.000 korban yang 500 diantaranya adalah anak-anak. Ukraina juga turut menderita kerugian kerusakan infrastruktur yang menyentuh angka senilai 138 miliar dollar AS sehingga menyebabkan kelumpuhan ekonomi Ukraina (Human Rights Watch, 2024; cnbcindonesia.com, 2023).

Di lain pihak, menurut media independent Rusia *Mediazona* terhitung jumlah korban tentara Rusia yang tewas akibat perang dengan Ukraina mencapai 27.432 korban pada November 2023.

Adapun menurut *Oryx* situs intelejen sumber terbuka pada Februari 2023 Rusia menderita kerugian kerusakan alutsista perang sebanyak 1000 unit, 1000 tank Rusia hilang dalam peperangan dengan catatan sebanyak 544 telah diambil oleh Ukraina dan 79 serta 65 unit lainnya mengalami kerusakan hingga ditinggalkan oleh pasukan militer Rusia (Lestari, 2023).

Serangan Rusia ke Ukraina telah menarik perhatian dunia internasional karena dampaknya yang serius. Banyak negara di seluruh dunia mengutuk tindakan penyerangan Rusia tersebut karena telah menyebabkan banyak korban jiwa dan berdampak pada krisis ekonomi global. PBB juga memberikan respon terhadap serangan Rusia ke Ukraina dengan merumuskan resolusi nomor A/RES/ES-11/1 melalui Sidang Majelis Umum PBB yang menuntut agar Rusia menarik mundur pasukannya dari wilayah Ukraina. Adapun Sidang Majelis Umum PBB pada Sesi Khusus Darurat di New York yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2022, menghasilkan sebanyak 141 negara menyetujui, 35 negara memilih *abstain*, dan 5 negara yaitu Korea Utara, Eritrea, Belarusia, Suriah termasuk Rusia menolak isi dari resolusi tersebut melalui pemungutan suara yang dilakukan (Muhaimin, 2022).

Dengan adanya resolusi Sidang Majelis Umum PBB, Presiden Vladimir Putin menganggap bahwa struktur tatanan dunia di bawah naungan PBB bersifat tidak adil. Hal ini disebabkan karena Presiden Vladimir Putin merasa bahwa penyerangan yang dilakukannya terhadap Ukraina bertujuan untuk melindungi Rusia dari kepungan NATO yang termanifestasikan melalui keberadaan pangkalan militer NATO di kawasan negara Baltik: Estonia, Latvia, Lithuania dan negara Eropa Timur lainnya yang dekat dengan perbatasan Rusia. Selain itu,

dalam konteks dinamika politik global yang dihadapi oleh Presiden Vladimir Putin, perjuangan Rusia ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan mewujudkan prinsip keadilan. Menurutnya, usaha ini diartikan sebagai bagian integral dari perjuangan Rusia untuk membentuk tatanan dunia yang baru (Sorongan, 2022).

Disisi lain, NATO juga secara aktif ikut campur tangan untuk membantu Ukraina dengan menyediakan berbagai bantuan dalam bentuk perlengkapan militer dan dukungan logistik. Jens Stoltenberg, yang merupakan Sekretaris Jenderal NATO, menyatakan bahwa NATO telah membantu pemerintah Ukraina dengan total nilai sekitar seratus miliar dollar selama satu tahun berlangsungnya perang. Bantuan ini mencakup dukungan dalam bidang keuangan, militer, dan kemanusiaan, dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan Ukraina dalam menghadapi konflik yang sedang berlangsung (Syarifudin, 2023).

Selain NATO dan Amerika Serikat, terdapat beberapa negara termasuk Uni Eropa yang berperan dalam memberikan bantuan kepada Ukraina selama berlangsungnya perang dengan Rusia. Bantuan yang diberikan meliputi berbagai aspek, seperti dukungan finansial, bantuan militer, serta bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut telah disalurkan ke Ukraina terhitung mulai dari Februari 2022 hingga 15 Januari 2023, dengan tujuan untuk membantu negara tersebut menghadapi tantangan dan dampak serangan militer dari Rusia.

Secara keseluruhan, Amerika Serikat menjadi negara yang memberikan bantuan terbesar kepada Ukraina dengan total nilai sebesar Rp. 37,8 triliun, diikuti oleh Uni Eropa yang memberikan bantuan senilai Rp. 29,92 triliun terhitung pada

tanggal 20 Januari 2023. Bantuan militer Amerika Serikat terhadap Ukraina mencakup 90 unit kendaraan lapis baja *Stryker*, yang dapat mengangkut sejumlah pasukan militer, serta sistem pertahanan kawasan udara *Avenger*. Selain itu, juga diberikan 59 unit alat tempur infanteri Bradley (*Bradley IFV*), dan ratusan jenis amunisi besar dan kecil. Bantuan ini bertujuan untuk memperkuat kapabilitas militer Ukraina dan membantu negara tersebut menghadapi tantangan yang dihadapinya akibat serangan dari Rusia (US Department of State, 2025).

Di sisi lain, Jerman juga telah memberikan bantuan militer pada tanggal 13 Mei 2023. Mereka memberikan 30 unit tank *Leopard*, kendaraan lapis baja, amunisi, dan drone pengintai dengan total nilai sekitar US\$3 miliar. Sementara itu, Inggris memberikan bantuan militer pada tanggal 17 Mei 2023, yang mencakup ratusan pesawat penyerang jarak jauh, ratusan sistem pertahanan udara dengan jangkauan lebih dari 200 kilometer, serta rudal jelajah *Storm Shadow* dengan jangkauan serang lebih dari 250 kilometer. Terakhir, Kanada juga turut memberikan bantuan militer pada tanggal 21 Mei 2023, dengan menyediakan ratusan senapan kaliber, amunisi, dan set radio pengintai senilai US\$39 juta kepada Ukraina (US Department of State, 2025).

Selain mendapat respon dan bantuan dari dunia internasional, penyerangan Rusia terhadap Ukraina juga menarik perhatian warga Rusia sendiri. Media Rusia, OVD-Info, melaporkan bahwa sekitar 2.000 orang melakukan demonstrasi di 60 kota di seluruh Rusia pada tanggal 24 Februari 2022 sebagai bentuk protes terhadap aksi penyerangan Rusia ke Ukraina. Akibat aksi protes tersebut, Kepolisian Rusia menangkap sekitar 5.900 demonstran karena mereka terus melakukan protes di jalanan

menentang penyerangan Rusia ke Ukraina. Parlemen Rusia mengambil tindakan dengan mengeluarkan peringatan kepada seluruh warga Rusia tentang konsekuensi hukuman bagi mereka yang mendukung aksi protes anti-perang.

Aksi protes terhadap penyerangan Rusia terhadap Ukraina terus meluas dan menarik perhatian di berbagai negara di dunia. Pada tanggal 27 Februari 2022, sekitar 100.000 orang di Berlin, Jerman, turun ke jalan untuk melakukan aksi protes mengecam tindakan Rusia. Di Republik Ceko, sebanyak 80.000 orang juga ikut serta dalam aksi protes terhadap Rusia di Alun-Alun Wenceslas. Selanjutnya, negara-negara seperti Estonia, Lithuania, dan Latvia melakukan tindakan pemboikotan terhadap produk-produk Rusia dan Belarusia yang dianggap bersekutu dengan Rusia. Tindakan ini meliputi pemboikotan terhadap majalah dan surat kabar dari Rusia, serta makanan dan minuman produk Rusia dan Belarusia. Di lain sisi, Swedia dan Finlandia juga mengambil langkah untuk memblokir peredaran minuman keras produksi Rusia di pasar mereka (euronews. 2024).

Alasan Penyerangan Rusia ke Ukraina

Meskipun serangan Rusia mendapat respon dari dunia internasional namun Rusia tetap melanjutkan serangannya ke Ukraina. Pemicu tindakan serangan Rusia terhadap Ukraina dipengaruhi oleh dilema keamanan yang dialami Rusia. Adapun dilema keamanan yang dialami Rusia didasarkan oleh persepsi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan wilayah, dan keinginan mempertahankan pengaruhnya di Ukraina.

1. Persepsi Ancaman terhadap Keamanan dan Kedaulatan Wilayah

Sejak negara pecahan Uni Soviet menyatakan kemerdekaan, hubungan antara Rusia dan Ukraina mengalami fluktuasi yang mencakup periode kerjasama dan periode ketegangan. Pada tahun 2022, ketegangan hubungan antara kedua negara mencapai puncaknya akibat serangan Rusia terhadap Ukraina (Conant, 2023). Ketegangan antara kedua negara erat hubungannya dengan masalah keamanan dan kedaulatan. Alasan mengapa Rusia menyerang Ukraina pada tahun 2022 disebabkan oleh faktor kekhawatiran Rusia terhadap kedekatan Ukraina dengan NATO. Dalam situasi ini, keberadaan pangkalan militer NATO yang dapat dilihat pada gambar 1 berada dekat dengan kota-kota besar Rusia seperti Moskow, St Petersburg, maupun Rostov-on-Don membuat posisi Rusia dikepung oleh NATO. Sehingga jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka Ukraina berpotensi menjadi negara pangkalan militer NATO selanjutnya yang bisa mengancam keamanan dan kedaulatan Rusia.

Pada awalnya Rusia dengan NATO memiliki hubungan kedekatan yang baik dan sudah terjalin pada tahun 1994, Rusia pernah bergabung dengan Program Kemitraan Perdamaian dengan NATO yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara NATO dengan negara-negara Eropa maupun negara-negara persemakmuran Uni Soviet. Keikutsertaan Rusia dalam Program Kemitraan Perdamaian dengan NATO merupakan awal dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan NATO pasca runtuhnya Uni Soviet. Program Kemitraan Perdamaian ini membuat Rusia bekerjasama dengan NATO dalam bidang

pertukaran informasi intelijen maupun latihan militer bersama (Roache, 2019).

Namun hubungan antara Rusia dan NATO mengalami ketegangan setelah terjadinya peristiwa *Revolusi Oranye* di Ukraina pada tahun 2004–2005 dan konflik Perang Rusia-Georgia pada tahun 2008. Adapun puncak dari ketegangan hubungan tersebut terjadi pada April 2014 akibat peristiwa Perang Donbass yang dipicu oleh kelompok separatis pro-Rusia.

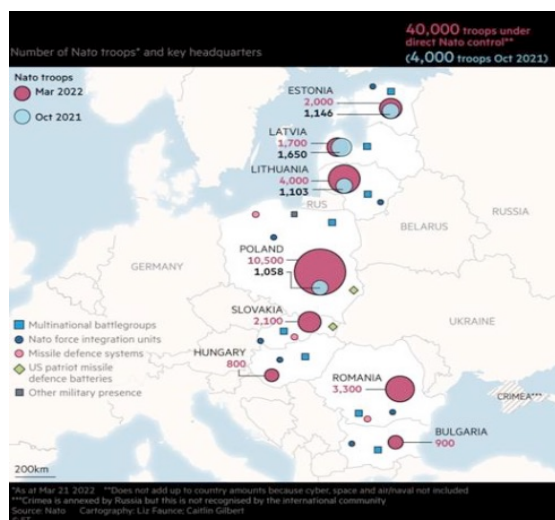
NATO menganggap aksi separatis ini sebagai tindakan agresi dan mengecam tindakan tersebut, yang menyebabkan Ukraina mengalami kerusakan infrastruktur dan menelan korban jiwa di wilayah Luhansk dan Donetsk. Sebagai respon, NATO mengambil tindakan pemutusan kerjasama dalam bidang keamanan, termasuk latihan militer bersama dan pertemuan tingkat tinggi dengan Rusia. Selain itu, NATO juga memberikan bantuan logistik dan militer kepada Ukraina untuk memperkuat pertahanannya setelah Perang Donbass yang dipicu oleh kelompok separatis pro-Rusia (NATO, 2015).

Rusia mulai merasakan kekhawatiran terhadap keamanan dan kedaulatan wilayahnya ketika Ukraina memilih untuk mulai mempertimbangkan bergabung dengan NATO pada tahun 2008 serta semakin dekat dengan NATO pasca aneksasi Krimea. Dalam situasi ini, Rusia memiliki kekhawatiran yang beragam dan kompleks terkait dengan kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO. Salah satunya adalah kekhawatiran Rusia tentang keamanan nasionalnya, karena peningkatan kehadiran militer NATO di dekat perbatasannya dapat dianggap sebagai ancaman langsung terhadap wilayah Rusia. Selain itu, Rusia juga khawatir ada kemungkinan negara-negara Eropa Timur lainnya mengikuti jejak

Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO.

Rusia meyakini bahwa apabila Ukraina bergabung dengan NATO, tindakan tersebut akan menciptakan dorongan bagi negara-negara di Eropa Timur lainnya untuk ikut serta dalam aliansi tersebut. Selain itu, hal ini juga akan mempermudah NATO dalam memperluas pengaruhnya di wilayah Eropa Timur. Kekhawatiran Rusia tentang kedaulatan wilayahnya muncul dalam situasi ini karena Ukraina dianggap sebagai salah satu tetangga yang memiliki kawasan strategis. Sehingga keanggotaan Ukraina di NATO berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut (Kofman, et al., 2017).

Gambar 1 Pangkalan Militer NATO dan AS di Eropa Timur



Sumber: Financial Times, 2022.

Berdasarkan gambar diatas, Rusia menghadapi kondisi yang menyulitkan akibat dari keberadaan pangkalan militer NATO khususnya negara Baltik yaitu Estonia, Latvia, dan Lithuania yang mengepung wilayah perbatasan kota-kota

besar Rusia (Moskow, St Petersburg, Rostov-on-Don).

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa langkah-langkah keberadaan pangkalan militer oleh NATO secara tidak langsung menguatkan dominasi kekuatannya di wilayah perbatasan Rusia. Ini yang membuat Rusia merasa terancam oleh keberadaan NATO di wilayah Eropa Timur (Financial Times, 2022). Selain itu, Rusia juga berupaya mempertahankan pangkalan militernya yang berada di Armada Laut Hitam Sevastopol yang dapat menampung hingga 100 kapal perang dan 25.000 pasukan militer angkatan laut. Tidak dapat dipungkiri, jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka seluruh pasukan militer laut Rusia yang berada di pangkalan Armada Laut Hitam Sevastopol akan berpotensi terlibat dalam konflik dengan NATO karena berada di wilayah yang sama. Alexander Grushko, Duta Besar Tetap Rusia untuk NATO, menyatakan bahwa ekspansi NATO memiliki potensi untuk menciptakan ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat (Zaborsky, 2022).

Hingga puncaknya, pada bulan Februari tahun 2022, Rusia memutuskan untuk meluncurkan serangan terhadap Ukraina demi menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman ekspansi NATO dengan merujuk pada Pasal 51 dari Piagam PBB yang mengatur hak suatu negara untuk melakukan tindakan pertahanan diri terhadap ancaman. Alasan untuk melakukan tindakan ini adalah untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO. Karena jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka Ukraina berpotensi akan membalas Rusia atas tindakan aneksasi Krimea dan Perang Donbass yang terjadi pada tahun 2014.

Akibat dari penyerangan ini, sebagian besar wilayah di Ukraina hancur

dan ribuan nyawa menghilang. Adapun tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Rusia menuai berbagai macam reaksi dari dunia internasional dan mayoritas negara-negara internasional mengecam tindakan penyerangan Rusia tersebut, serta memberikan berbagai macam bantuan kemanusiaan maupun bantuan militer terhadap Ukraina untuk melawan aksi penyerangan yang dilakukan oleh Rusia, meskipun hingga pada tahun 2023 perang antar keduanya masih berlanjut dan upaya perdamaian masih belum dapat diwujudkan (Ornay & Nur, 2022).

2. Keinginan Mempertahankan Pengaruh atas Ukraina

Bagi Rusia mempertahankan pengaruhnya di Ukraina menjadi sangat penting. Dalam perspektif dilema keamanan, setiap negara kelas atas perlu memenangkan persaingan dengan negara kelas atas lainnya untuk mencapai dominasi dalam sistem internasional dan mencari keamanan yang memadai, yang dapat diartikan jika Rusia perlu memenangkan persaingan dengan kekuatan Barat (Amerika Serikat dan Uni Eropa) yang mendukung Ukraina ketika Ukraina melamar menjadi anggota NATO. Dalam politik internasional yang anarkis, Rusia merasa perlu untuk mendominasi Ukraina dan politik di kawasan Eropa Timur dalam rangka mencari keamanan yang memadai.

Rusia telah lama memiliki kepentingan yang kuat terhadap Ukraina, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi upaya Rusia dalam mempertahankan pengaruhnya terhadap Ukraina. Pertama, Ukraina memiliki sejarah dan budaya yang sangat terkait dengan Rusia. Sebelum merdeka pada tahun 1991, Ukraina merupakan bagian

yang integral dari Uni Soviet dan memiliki ikatan yang sangat kuat dengan negara-negara Uni Soviet lainnya. Ikatan ini terjalin melalui masa-masa penuh tantangan, dinamika politik yang rumit, serta pertukaran budaya dan linguistik yang mendalam.

Hubungan sejarah antara Ukraina dan Rusia telah menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan pengaruh Rusia di wilayah tersebut. Selain itu, perlu dipertimbangkan peran geostrategis Ukraina dalam mengukuhkan pengaruh Rusia. Dengan posisinya sebagai tetangga di sebelah timur Rusia, Ukraina berfungsi sebagai penghalang alami bagi Rusia yang menghubungkan Rusia dengan Eropa. Keberadaan Ukraina di dalam lingkup pengaruh Rusia memiliki implikasi signifikan, di mana kehilangannya dapat mengakibatkan Rusia merasa terisolasi dan melemah di kancah internasional, sementara mempertahankannya akan memberikan keuntungan penting bagi Rusia dalam menjaga stabilitas dan memperluas pengaruhnya (Masters, 2023).

Situasi tersebut menciptakan keprihatinan serius karena berpotensi mengancam kedaulatan Ukraina dan menciptakan ketegangan yang berkelanjutan, baik dalam ranah domestik maupun hubungan antar negara di wilayah tersebut. Konflik ini juga mempengaruhi berbagai bidang kehidupan di kawasan tersebut, termasuk dampaknya pada ekonomi, stabilitas sosial, serta hubungan internasional. Oleh karena itu, resolusi konflik dan pemulihan perdamaian menjadi prioritas utama yang mendesak, baik bagi pemerintah Ukraina maupun komunitas internasional secara keseluruhan. Selain itu, Rusia juga memanfaatkan upaya diplomasi perdamaian sebagai alat untuk mempertahankan pengaruhnya di Ukraina yang secara otomatis menempatkan Rusia

untuk menyampaikan kepentingannya mengenai alasan mengapa Rusia terlibat dalam perang Donbass sehingga kepentingannya menjadi lebih mudah untuk diwujudkan jika Ukraina menginginkan perdamaian (Ratsiborynska, 2020).

Sejak terjadinya peristiwa aneksasi Krimea dan perang di Donbass, keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO semakin menguat, dan membuat Ukraina semakin yakin bahwa beraliansi dengan NATO dapat memberikan keamanan dan dukungan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan regional. Bahkan pada tanggal 21 Februari 2019, Ukraina melakukan amandemen terhadap konstitusinya dengan memasukkan cita-cita strategis negara untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa ke dalam berbagai bagian Undang-Undang Dasar. Amandemen ini mencakup perubahan dalam prambule, pasal-pasal mengenai ketentuan peralihan, serta tiga pasal konstitusi negara. Menanggapi hal tersebut, NATO menegaskan untuk mendukung keinginan Ukraina pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang diadakan di Brussels pada bulan Juni 2021 (Holland, 2024).

Sebagai dampak dari kedekatan antara Ukraina dengan NATO, partai-partai politik yang mendukung Rusia di Ukraina kini ditinggalkan, sementara pemerintah di Kyiv secara berturut-turut telah memperkuat upaya integrasi negara mereka ke dalam kerangka Euro-Atlantik yang lebih besar. Presiden Vladimir Putin menyadari bahwa masa depan warisannya sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengubah perkembangan saat ini. Jika ia gagal dalam misi bersejarahnya untuk membawa Ukraina kembali di bawah pengaruh Kremlin, ia akan diingat oleh generasi masa depan di Rusia sebagai pemimpin yang tidak berhasil mencapai

tujuannya. Setelah lebih dari tiga ratus tahun dominasi Rusia terhadap Ukraina, Presiden Vladimir Putin bersiap untuk diabadikan dalam catatan sejarah sebagai pemimpin yang kehilangan kendali atas Ukraina.

Dalam konteks politik saat ini, Ukraina semakin menjauh dari pengaruh Rusia setelah Presiden Vladimir Putin mengemukakan pandangannya mengenai kerjasama yang telah berlangsung selama 30 tahun antara Rusia dan Ukraina dalam artikel yang diterbitkannya, yang menurut Presiden Vladimir Putin adalah model yang patut diikuti oleh Uni Eropa. Di akhir artikel, Presiden Vladimir Putin juga mengkritik peran geopolitik Barat yang dianggapnya menjadi penghalang dalam hubungan antara Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, ia meyakini bahwa kedaulatan Ukraina hanya dapat terwujud jika Ukraina dan Rusia bersedia untuk berkerjasama secara lebih erat, mengingat sejarah bersama yang terjalin di antara keduanya.

Putin telah menunjukkan kesiapannya untuk membayar harga yang sangat tinggi demi mencegah Ukraina meninggalkan pengaruh Rusia. Tindakan penyerangan yang diambilnya saat ini mencerminkan keyakinannya bahwa negara-negara demokratis akan lebih memilih kompromi dibandingkan konfrontasi. Saat ini, tanggung jawab untuk membuktikan bahwa Putin bersalah ada di tangan para pemimpin Barat. Selama Ukraina masih berada dalam zona geopolitik abu-abu, negara tersebut akan tetap menjadi sasaran agresi Rusia dan sumber utama ketidakstabilan global (Dickinson, 2022).

Secara keseluruhan, konflik antara Rusia dan Ukraina dapat dipahami sebagai hasil dari persaingan antara Rusia dengan Barat untuk mempengaruhi arah politik Ukraina. Rusia berusaha mempertahankan

pengaruhnya di Ukraina sementara Barat berusaha mendukung integrasi Ukraina dengan NATO. Penyerangan Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022 menandai eskalasi dari konflik yang telah berlangsung selama delapan tahun. Perang yang dipicu oleh Rusia ini juga menjadi kesalahan strategis besar oleh Presiden Vladimir Putin, karena justru mempercepat upaya Ukraina untuk bergabung dengan blok Barat, yaitu NATO.

KESIMPULAN

Penyerangan Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 menandai eskalasi dari konflik yang telah berlangsung selama delapan tahun. Selain itu, serangan Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 juga menyita perhatian dunia internasional. PBB bahkan merumuskan resolusi pada tanggal 02 Maret 2022 melalui Sidang Majelis Umum yang memuat tentang pengecaman terhadap aksi penyerangan Rusia terhadap Ukraina dengan nomor resolusi A/RES/ES-11/1. Pemicu tindakan serangan Rusia terhadap Ukraina ini dipengaruhi oleh dilema keamanan yang dialami Rusia. Dilema keamanan ini didasarkan pada persepsi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan wilayahnya, dan keinginan untuk mempertahankan wilayah pengaruhnya atas Ukraina.

Bagi Rusia, Ukraina dianggap sebagai salah satu tetangga yang memiliki kawasan strategis dan dapat menyebabkan penempatan pasukan militer NATO di wilayah yang dekat dengan perbatasan Rusia. Hal ini secara tidak langsung dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Rusia. Selain itu, bagi Rusia mempertahankan pengaruhnya di Ukraina menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan *security dilemma* yang dialami

oleh Rusia, dimana Rusia perlu memenangkan persaingan dengan kekuatan Barat yang mendukung Ukraina melamar menjadi anggota NATO. Oleh karena itu, Rusia memiliki kepentingan yang kuat terhadap Ukraina, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan serta menganggap Ukraina satu bangsa dengan dengannya.

REFERENSI

Armandhanu, Denny. 2015. Korban Tewas di Konflik Ukraina Capai 6.000 Orang. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150302230043-134-36204/korban-tewas-di-konflik-ukraina-capai-6000-orang>

Conant, Eve. 2023, February 24. Russia and Ukraine: the tangled history that connects—and divides—they. *National Geographic*. <https://www.nationalgeographic.com/history/article/russia-and-ukraine-the-tangled-history-that-connects-and-divides-them#:~:text=After%20the%20com>.

De Ormay, E.S. dan Azizah, N. 2022. Kepentingan Keamanan Nasional Rusia Dalam Serangan Militer Terhadap Ukraina Tahun 2022. *Jurnal Universitas Bung Karno*. <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/226>

Dickinson, Peter. 2022. *Vladimir Putin fears Ukrainian democracy not NATO expansion*. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-worst-nightmare-is-ukrainian-independence-not-nato-expansion/>

- Ekman, Per. 2024. Painful Moments and Realignment: Explaining Ukraine's Foreign Policy, 2014–2022. *Problems of Post-Communism*. Vol. 71, No. 3, 232–244.
<https://doi.org/10.1080/10758216.2023.2253358>
- Financial Times*. 2022. Nato's eastern front: will the military build-up make Europe safer?,
<https://www.ft.com/content/a1a242c3-9000-454d-bec7-c49077b2cc6c>
- Herz, John H. 1950, January. Idealist Internationalism and the Security Dilemma. *World Politics*, Vol. 2(2). DOI: <https://doi.org/10.2307/2009187>
- Holland, L.B. 2024, July 12. *NATO enlargement: Ukraine*. Research Briefing. No.9819. House of Commons Library.
- Human Rights Watch*. 2024. Our City Was Gone: Russia's Devastation of Mariupol, Ukraine. ISBN: 979-8-88708-101-4.
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2024/02/ukraine0224web_0.pdf
- Jackson, R. and Sørensen, G. 2013. *Introduction to International Relations*. Fifth edition. UK: Oxford University Press.
- Kirby, Paul. 2022, Maret 31. Perang Ukraina: Apa yang diinginkan Putin dari Ukraina untuk mengakhiri perang?. *BBC News Indonesia*.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60507911>
- Kofman, M., et al. 2017. Lessons from Russia's Operations in Crimea and Eastern Ukraine.
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1498.html
- Lestari, P.H. 2023. Ukraina Boncos Rp2,1 Kuadriliun selama perang, Berapa Kerugian Rusia?.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20230210/19/1626729/ukraina-boncos-rp21-kuadriliun-selama-perang-berapa-kerugian-rusia>
- Majelis Umum PBB Desak Rusia Segera Angkat Kaki dari Ukraina. 2022, March, 22. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220303010121-134-766218/majelis-umum-pbb-desak-rusia-segera-angkat-kaki-dari-ukraina>
- Masters, Jonathan. 2023, February 14. *Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe and Russia*. Council for Foreign Relations.
<https://www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflict-crossroads-europe-and-russia>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., and Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analyses. A Methods Sourcebook*. 3rd edition. USA: Sage Publication Inc.
- Muhaimin. 2022, March 3. 141 Negara Termasuk Indonesia Menentang Invasi Rusia ke Ukraina, 5 Dukung, 35 Abstain. *SindoNews*.
<https://international.sindonews.com/read/701923/42/141-negara-termasuk-indonesia-menentang-invasi-rusia-ke-ukraina-5-dukung-35-abstain-1646280213>
- NATO*. 2015. NATO-Russia Relations: The Background.
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_12/1512-background_nato-russia_en.pdf

- Neuman, W. Lawrence. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi ke-7. Jakarta: PT. Index.
- OBE, O.L., and Wallace, J. 2022, March 24. Ukraine-Russia relations. *Chatham House*.
<https://www.chathamhouse.org/2021/11/ukraine-russia-relations>
- Oktarianisa, Sefti. 2022. Kronologi & Penyebab Mengapa Rusia Menyerang Ukraina. *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220225052726-4-318218/kronologi-penyebab-mengapa-rusia-menyerang-ukraina>
- PBB: Lebih Dari 10.000 Warga Sipil Tewas Selama Perang. 2023, November 22. *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231122174402-8-491217/pbb-lebih-dari-10000-warga-sipil-tewas-selama-perang>
- Pro-Ukraine protests take place in European capitals as 1,000th day of war approaches. 2024, November 18. *Euronews*.
<https://www.euronews.com/my-europe/2024/11/18/pro-ukraine-protests-take-place-in-european-capitals-at-1000th-day-of-war-approaches>
- Putin tetapkan empat wilayah Ukraina sebagai milik Rusia, Indonesia: 'Setiap negara harus hormati kedaulatan negara lain'. 2022, October 22. *BBC News Indonesia*.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2dekde3lpo>
- Ratsiborynska, Vira. 2020. Russia's Strategic Exercise: Messages and Implication.
<https://stratcomcoe.org/publications/russia-as-strategic-exercises-messages-and-implications/30>
- Roache, Madeline. 2019. Breaking Down the Complicated Relationship Between Russia and NATO. *Time*.
<https://time.com/5564207/russia-nato-relationship/>
- Sorongan, P.T. 2022. Putin Blak-Blakan Sebut Rusia Bangun Tatanan Dunia Baru. *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231130195534-4-493534/putin-blak-blakan-sebut-rusia-bangun-tatanan-dunia-baru>
- Syarifudin. 2021. Moskow: Latihan Militer Sea Breeze Terang-terangan Anti-Rusia. *SindoNews*.
<https://international.sindonews.com/read/472724/41/moskow-latihan-militer-sea-breeze-terang-terangan-anti-rusia-1625231220/7>
- Tang, Shiping. 2009. The Security Dilemma: A Conceptual Analysis. *Security Studies*. Vol. 18 (587–623). ISSN: 0963-6412, e-ISSN: 1556-1852. DOI: 10.1080/09636410903133050.
- UNEP. 2022. The Environmental Impact of the Conflict in Ukraine: A Preliminary Review. ISBN: 978-92-807-3969-5.
<https://wedocs.unep.org/20.500.11822/40746>
- US Department of State. 2025, March 25. U.S. Security Cooperation with Ukraine. *Fact Sheet*. <https://www.state.gov/bureau-of-political-military-affairs/releases/2025/01/u-s-security-cooperation-with->

ukraine#:~:text=To%20date%2C%20we
%20have%20provided,\$31.7%
20billion%20from%20DoD%20stockpile
s.

Relations.

[https://www.belfercenter.org/publication/
crimea-and-black-sea-fleet-russian-
ukrainian-relations](https://www.belfercenter.org/publication/crimea-and-black-sea-fleet-russian-ukrainian-relations)

Zaborsky, Victor. 2022. *Crimea and the
Black Sea Fleet in Russian-Ukrainian*